



BAURAN KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER TERHADAP PEREKONOMIAN DALAM PRESPEKTIF SYARIAH

Dodi Okri Handoko¹, Popi Adiyes Putra², Rifki Ismail³ & Andri Soemitra⁴

^{1,2,3&4}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : dodioCRI@eco.uir.ac.id, adiyes.putra123@gmail.com, rifki_ismal@yahoo.com, andrisoemitra@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang mempengaruhi kebijakan ekonomi makro. Penetapan kebijakan ekonomi secara makro akan memberikan dampak pada pencapaian peningkatan ekonomi. Agar pertumbuhan ekonomi sesuai dengan yang diharapkan, maka kebijakan moneter dan fiskal harus berjalan saling beriringan dan saling mendukung. Jika kedua kebijakan itu saling berlawanan dan tidak saling mendukung, maka pertumbuhan ekonomi akan terganggu atau malah mencapai nol. Oleh karena itu diperlukan interaksi dan interkoneksi antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal. Kedua lembaga pemerintah yang berwenang menangani masalah keduanya, baik Kementerian Keuangan sebagai penanggung jawab kebijakan fiskal maupun Bank Indonesia sebagai pemegang mandat dalam menetapkan kebijakan moneter, harus bisa menyatukan kebijakan-kebijakan demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang mensejahterakan rakyat.

Kata Kunci : Kebijakan Fiskal, Kebijakan Moneter, Bauran.

ABSTRACT

Monetary policy and fiscal policy are policies that influence macroeconomic policy. Macroeconomic policy setting will have an impact on achieving economic improvement. In order for economic growth to be as expected, monetary and fiscal policies must go hand in hand and support each other. If the two policies are opposed to each other and do not support each other, then economic growth will be disrupted or even reach zero. Therefore, it is necessary to interact and interconnect monetary policy with fiscal policy. The two government institutions that are authorized to handle the problem of both, both the Ministry of Finance as the person in charge of fiscal policy and Bank Indonesia as the mandate holder in setting monetary policy, must be able to unify policies to encourage economic growth that prospers the people.

Keywords : Fiscal Policy, Monetary Policy, Mix.

PENDAHULUAN

Kehidupan berbangsa dan bernegara tidak bisa dilepaskan dengan kegiatan perekonomian. Perekonomian merupakan aktivitas yang ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah sebagai pemegang mandat dituntut agar mampu melakukan pengelolaan perekonomian, baik dalam skala mikro ataupun yang lebih luas dalam skala makro. Salah satu tugas pemerintah dalam pengelolaan perekonomian adalah menciptakan dan menjaga kestabilan perekonomian. Stabilitas perekonomian dimainkan oleh pemerintah berupa pengambilan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.

Kebijakan fiskal diambil pemerintah dengan tujuan untuk pembangunan yang diarahkan pada tiga fungsi utama, yakni fungsi alokasi anggaran dalam melanjutkan pembangunan, fungsi distribusi dan substitusi pendapatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warga negara, dan fungsi stabilisasi makroekonomi untuk meningkatkan perekonomian. Di Indonesia kebijakan fiskal dinaungi oleh Kementerian Keuangan dan menggunakan instrumen APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi. Namun, salah satu instrumen penting untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam kebijakan fiskal Indonesia masih dalam tingkat defisit. Selain kebijakan fiskal, pemerintah juga mengatur kebijakan moneter. Penanganan kebijakan moneter berada di bawah tanggung jawab Bank Indonesia (BI). BI mengatur kebijakan moneter sebagai bentuk menjalankan fungsi stabilitas ekonomi dengan fokus pada peredaran uang (Bayuni dan Srisusilawati, 2018). BI berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang nomor 3 Tahun 2004 tentang Perbankan Indonesia diberikan tanggung jawab untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah.

Kebijakan fiskal dan moneter saling memiliki keterkaitan dalam rangka menstabilkan perekonomian, sehingga

diperlukan koordinasi dan interaksi antara keduanya. Koordinasi dan interaksi diperlukan agar masing-masing kebijakan tidak berjalan sendiri dan apalagi sampai berbenturan, sehingga menjadi penghalang terciptanya kestabilan perekonomian. Kebijakan fiskal dan moneter, dalam jangka panjang tidak saling bertentangan khususnya dalam tercapainya pertumbuhan ekonomi (Chenny, 2005). Santoso dan Basuki juga menemukan dalam penelitiannya bahwa kebijakan moneter dan fiskal memberikan pengaruh yang signifikan terhadap PDB suatu negara dan jika kedua kebijakan itu saling bertolak belakang, maka akan mengganggu pertumbuhan ekonomi bahkan bisa mencapai nol (Santoso & Basuki, 2009). Hadi et al, (2018) juga mengemukakan dalam penelitian mereka bahwa interaksi antara kebijakan fiskal dan moneter diperlukan agar ada keselarasan dalam kebijakan makro ekonomi, sehingga memberikan dampak signifikan terhadap penguatan ekonomi.

Pola hubungan dan interaksi serta bauran antara kebijakan fiskal dan moneter perlu untuk mendapatkan kajian terutama dari perspektif Islam. Sejauhmana masing-masing kebijakan saling mempengaruhi dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi. Memperhatikan pentingnya kesatuan kebijakan fiskal dan moneter untuk pertumbuhan ekonomi, maka dalam paper ini penulis memfokuskan penelitian pada bauran kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dalam perspektif Islam.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan fiskal atau kebijakan moneter terdiri dari dua kata, yaitu kebijakan dan fiskal atau moneter. Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan mendefinisikan kata kebijakan (*policy*) adalah program-program dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan dasar nilai-nilai dan praktek-praktek yang terstruktur (Islamy, 2009). James E. Anderson juga mengemukakan kebijakan adalah perilaku sejumlah pejabat dari kelompok atau instansi pemerintah dalam menentukan suatu bidang

dalam kegiatan tertentu (Wahab, 2005). Askari et al, (2014) juga mengemukakan kebijakan adalah keputusan pemerintah dalam melakukan tindakan diarahkan mencapai tujuan yang konsisten dengan masyarakat. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah lewat instrumen kebijakan fiskal yang diterapkan melalui pendapatan dan pengeluaran negara dengan tujuan mendikte permintaan agregat dalam perekonomian. Kebijakan fiskal ada yang berposisi sebagai kebijakan fiskal aktif dan kebijakan fiskal pasif. Kebijakan fiskal aktif dijalankan pemerintah melalui perubahan tingkat pajak dan membelanjakan sebagai sarana. Sementara itu, kebijakan fiskal pasif dijalankan dalam bentuk menurunkan anggaran belanja dari anggaran pendapatan nasional (Turmidi, 2019). Memperhatikan hal di atas, kebijakan fiskal merupakan strategi pemerintah dalam melakukan pengelolaan keuangan negara baik lewat pengelolaan pajak ataupun pengeluaran lewat perbelanjaan dengan tujuan pemberantasan masalah ekonomi nasional (Sukirno, 2006). Kebijakan fiskal juga diartikan sebagai upaya peningkatan surplus atau menurunkan defisit pemerintah tanpa tindakan eksplisit dari pembuat kebijakan (Aini, 2019). Rozalinda juga mengemukakan kebijakan fiskal sebagai kebijakan pemerintah terutama mengatur pendapatan dan pengeluaran negara dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Rozalinda, 2015).

Sedangkan kebijakan moneter yaitu program pemerintah yang dalam hal ini dilakukan oleh bank sentral melalui pasar uang dalam rangka mempengaruhi situasi makro (Budiono, 2001). Menurut Pohan (2018) juga berpendapat kebijakan moneter sebagai rencana dan tindakan lembaga yang mempunyai otoritas moneter untuk menjaga keseimbangan moneter dan kestabilan nilai uang, membuka ruang produksi dan pembangunan serta membuka peluang kerja sebagai bentuk peningkatan taraf hidup rakyat. Dalam undang-undang tentang Bank Indonesia No. 23 tahun 1999 yang telah

diubah dalam undang-undang No. 3 tahun 2004 disebutkan bahwa kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dibuat dan dilakukan oleh Bank Indonesia dalam usaha mencapai dan menjaga stabilitas rupiah lewat pengaturan uang beredar dan suku bunga. Berdasarkan pengertian di atas didapatkan bahwa kebijakan moneter merupakan instrumen kebijakan ekonomi makro yang menjadi pekerjaan yang di pegang oleh bank sentral lewat penerapan penawaran uang, kredit dan tingkat bunga, serta pengeluaran dalam perekonomian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan telaah literatur dari beberapa penelitian yang sudah ada. Pengumpulan data menggunakan metode data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal, artikel prosiding, buku, dan internet. Kemudian menganalisis bauran antara fiskal dan moneter dari data sekunder tersebut untuk merumuskan bagaimana mensenergikan antara kebijakan fiskal dan moneter dalam Islam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Instrumen Kebijakan Fiskal dan Moneter

Dalam penerapan kebijakan fiskal, pemerintah menyusun instrumen fiskal yang akan dijalankan. Menurut Adiwarmanto Karim, ada beberapa instrumen yang digunakan pemerintah dalam penghimpunan dana, diantaranya; a) melakukan bisnis lewat kegiatan usaha yang dijalankan oleh badan usaha milik negara (BUMN), b) penghimpunan pajak, dan c) peminjaman uang (Karim, 2007). Lanjutnya dalam Islam, instrumen fiskal Islam mengedepankan pada kebijakan pendapatan, berupa pajak dalam bentuk penerapan *kharja*, *jizyah*, dan *khums*, penetapan anggaran pendapatan dan belanja negara sebetuk APBN (Karim, 2016).

Selanjutnya instrumen kebijakan fiskal kebanyakan menyangkut pajak dan pengeluaran berupa belanja negara. Pajak menjadi instrumen fiskal yang dominan

dalam pembiayaan rencana pembangunan negara. Pajak menjadi kewajiban yang memaksa, sehingga semua warga negara tunduk dan wajib membayarnya. Sedangkan pengeluaran negara telah disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN memuat pengeluaran berupa pembiayaan pembangunan infrastruktur, biaya operasional pemerintah, biaya pembangunan masyarakat, hingga jaminan kesehatan. Kebijakan fiskal penerimaan dan pengeluaran dilakukan berupa kebijakan anggaran *surplus*, kebijakan fiskal seimbang, kebijakan fiskal dinamis, dan kebijakan fiskal defisit yang digunakan sesuai keperluan (Turmidi, 2019). Sedangkan kebijakan didasarkan pada teori dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengeluaran anggaran, dan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan sebagai akses pendapatan nasional.

Berbeda dengan kebijakan fiskal, kebijakan moneter lebih kepada pengelolaan keuangan yang pengelolaannya dinahkodai oleh bank sentral. Bank sentral akan mengeluarkan piranti dalam bentuk instrumen kebijakan moneter, berupa rasio cadangan yang disyaratkan, tingkat diskonto dan operasi pasar terbuka. Ketiga instrumen dasar ini kemudian dituangkan dalam bentuk instrumen-instrumen yang potensial untuk dilakukan, diantaranya; a) Penetapan Giro Wajib Minimum (*Reserve Requirement*) oleh Bank sentral, dengan mewajibkan kepada bank-bank untuk menyisihkan dalam bentuk dana cadangan yang diletakan di bank sentral. Dana-dana yang terhimpun lewat GWM bisa digunakan ketika bank-bank tersebut mengalami masalah dalam keuangan mereka. b) Penentuan *Discount Rate* lewat ketetapan Bank sentral. Bank sentral selain sebagai regulasi juga sebagai control moneter dan perantara keuangan. Bank-bank komersil dapat melakukan pinjaman ke bank sentral dikala tingkat diskonto bank sentral lebih rendah dari bunga pasaran. Bank sentral menginginkan bank-bank komersial tersebut melakukan pinjaman kepadanya dengan tujuan untuk menunjang ketersediaan kredit oleh bank kepada nasabahnya. c)

Operasi pasar terbuka (*open market operation*) lewat kebijakan bank sentral melakukan jual beli sekuritas di pasar terbuka. Pembelian sekuritas umum (swasta) oleh bank sentral di pasar terbuka akan mereduksi sekuritas umum yang dipegang oleh bank-bank komersial, dan bank-bank komersial akan memiliki ketersediaan kredit yang lebih untuk disalurkan. Tetapi jika bank sentral melakukan penjualan sekuritas dalam bentuk melepas obligasi pemerintah ke bank-bank komersial, artinya secara tidak langsung bank sentral melakukan upaya penarikan uang beredar dan akan terjadi kontraksi terhadap kredit yang akan disalurkan (International Shari'ah Research Academy for Islam, 2015).

Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Perspektif Islam

Kebijakan fiskal dalam Islam salah satu kebijakan yang menjadi perhatian penting dalam perekonomian. Imam al-Ghazali menjadikan kebijakan fiskal sebagai salah satu kebijakan terkait upaya dalam meningkatkan kesejahteraan yang berlandaskan keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan dan kepemilikan (Nasution et al, 2007). Dalam Islam, kebijakan fiskal telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW, dilanjutkan pada masa Khalifah Urrasyidin, dan dikembangkan metodenya pada masa kekhalifahan Islam berikutnya. Ahli-ahli Islam pada kekhalifahan Islam semisal Ibnu Khaldun (1404 M) telah menyinggung terkait kebijakan fiskal, diantaranya terkait dengan langkah mengatasi resesi ekonomi dengan cara menurunkan nilai pajak dan meningkatkan belanja pemerintah. Abu Yusuf (798 H) dalam kitab *al-Kharaj* yang ditulisnya juga telah menyinggung kewajiban pemerintah menyediakan bahan-bahan sebagai pemenuhan kebutuhan rakyatnya. Abu Yusuf juga tidak setuju dengan pemungutan pajak lahan pertanian dan memberikan masukan untuk menggantinya dengan kewajiban mengeluarkan zakat hasil pertanian (Karim, 2016).

Tujuan dari kebijakan fiskal menurut ekonomi Islam termasuk membangun struktur insentif untuk kepatuhan aturan, pengentasan kemiskinan, penyediaan jaring pengaman yang memadai, dan perlindungan lingkungan. Tingkat ketergantungan pada perpajakan dan/atau keuangan publik akan tergantung pada tingkat kepatuhan anggota masyarakat dengan aturan redistributif yang diamanatkan, yang melengkapi program kesejahteraan sosial melalui instrumen redistribusi Islam dan perkembangan ekonomi.

Hadirnya pemikiran ekonomi terkait dengan kebijakan fiskal didasari oleh pengaruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang mengesa lahirnya gagasan pemanfaatan penerimaan dan pengeluaran dalam upaya peningkatan stabilitas ekonomi. Strategi dalam mengubah pendapatan dan pengeluaran ini disebut dengan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dalam Islam tidak sama persis dengan ekonomi konvensional, ada persamaan terutama menganalisis dan merumuskan kebijakan ekonomi secara bersama-sama. Secara konsep tujuan ekonomi dalam Islam dan konvensional diarahkan pada pemaksimalan tercapainya kesejahteraan hidup manusia. Upaya pemaksimalan itu dilakukan melalui kebijakan publik yang diarahkan pada hadirnya kesejahteraan hidup. Dalam ekonomi konvensional, poin kesejahteraan hidup merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai individu di dunia, namun dalam Islam kesejahteraan tidak hanya di dunia, tapi juga kesejahteraan di alam akhirat nanti.

Dalam upaya tercapainya kesejahteraan dunia dan akhirat (*falah*), Islam telah menggariskan aturan dalam pengelolaan terkait sumber daya. Pendapatan negara dari sumber daya yang dimiliki dalam pembangunan Islam yang dikumpulkan oleh lembaga *Baitul mall* dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian: *pertama*, pendapatan yang berasal dari umat Islam sendiri, misalnya dari *zakat*, *wakaf*, *infak*, *nawaib*, *sedekah*, dan pendapatan lainnya. *Kedua*, sumber penerimaan yang berasal dari golongan non

muslim seperti pembebanan *jizyah*, *kharaj*, dan *ushur*. Pendapatan lain negara bersumber dari *ghanimah*, *fai'*, *copy money*, dana hibah dari negara lain dan dana pinjaman pemerintah pada negara/lembaga lain (Sopian et al., 2019). Lebih jelasnya sumber pendapatan negara dalam Islam adalah sebagai berikut;

- a) *ZISWAF*; Harta dengan ukuran dan takaran tertentu yang wajib/sunnah dikeluarkan penganut Islam.
- b) *Jizyah*; Pajak non-Muslim di negara di bawah pemerintahan Islam.
- c) *Kharaj*; Cukai hasil bumi yang dikenakan kepada non muslim.
- d) *Ushur*, Pajak khusus (impor) barang 10% dari nilai barang komersial.
- e) *Nawaib*; Pajak khusus dikenakan pada muslim kaya.
- f) Pinjaman; Hutang yang harus dibayar.
- g) *Wakaf*; Sedekah jariyah, mendonasikan harta untuk kemaslahatan umat.
- h) *Fa'i*; berupa harta yang dipungut dari penduduk yang bukan muslim dan bukan harta rampasan perang.
- i) *Khums*; 1/5 bagian stabil dari *ghanimah* (rampasan perang).
- j) *Amwal fadla*; Benda muslim yang mati tanpa ahli waris (Huda et al, 2016).

Senada dengan di atas, kebijakan fiskal Islam bisa juga dikelompokkan dalam bentuk; a) kebijakan penerimaan negara terutama dari penganut Islam berupa kewajiban mengeluarkan zakat, *ushr* (bea masuk), wakaf dan lain-lain, sedangkan dari penganut selain Islam dari penerapan *jizyah*, *kharaj* dan *ushr*. b) kebijakan terkait pengeluaran negara, yang diarahkan pada peningkatan taraf kehidupan masyarakat dan peningkatan kesholehan masyarakat dalam beribadah. Ibnu Taimiyah berpendapat, pemerintah Islam dalam penggunaan anggaran harus menghadirkan program terutama penghapusan kemiskinan, adanya aturan dalam pasar (regulasi pasar),

perencanaan ekonomi dan kebijakan moneter.

Sementara itu, moneter merupakan instrumen yang bersangkutan dengan uang, pembahasan moneter akan membahas kebijakan terkait dengan uang. Uang adalah bagian penting dalam kehidupan, makanya pelajaran menyangkut uang adalah sesuatu yang perlu untuk diketahui terutama pengetahuan uang menurut Islam. Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang uang sebagai standar ukur yang perwujudannya seperti cermin yang memantulkan warna tapi ia sendiri tidak memiliki warna sesuai dengan konsep netralitas uang (Rosia, 2018). Ibnu Taimiyah juga berpendapat, uang sebagai standar nilai, alat tukar untuk mendapat barang, dan uang tidak bisa diperdagangkan. Ibnu Taimiyah menjelaskan uang tidak dapat memberikan manfaat langsung, tapi manfaat yang akan diterima ketika uang itu dibelanjakan atau ditukarkan dengan barang lain (Juhro et al, 2020). Ibnu Khaldun juga menjelaskan uang sebagai standar pengukuran dan penyimpan nilai. Emas dan perak menurut Ibnu Khaldun adalah bentuk uang tahan dan relatif stabil (Turmidi, 2019) (Karim, 2001).

Melihat pengertian uang yang dikemukakan ahli di atas, terlihat bahwa uang memegang peranan penting dalam perekonomian. Ketiadaan uang akan menyebabkan munculnya beragam masalah social, dan kelebihan uang yang tidak terkendali atau tidak sebanding dengan keberadaan barang juga akan menjadi masalah dalam ekonomi. Makanya kestabilan uang harus menjadi kebijakan dari negara terkait dengan uang. Instrumen moneter pada konvensional yang hanya menekankan pada GMW, tingkat diskonto, dan pasar terbuka menuai kritik dari kalangan ekonom Islam. Mereka berpendapat bisakah instrumen-instrumen itu berfungsi sebagai instrumen moneter Islam? Mereka menolak terutama penerapan tingkat diskonto yang dalam prakteknya masih menggunakan bunga atas pinjaman yang disediakan bank sentral. Bank sentral

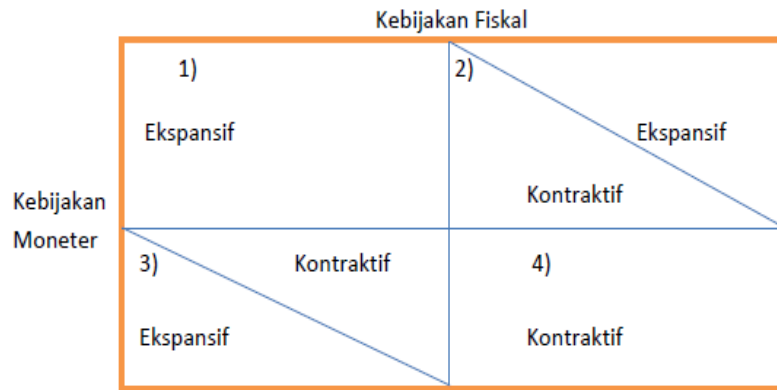
seharusnya memberikan perlindungan dan pilihan lain yang sesuai dengan Islam (International Shari'ah Research Academy for Islam, 2015).

Berikutnya Umer Chapra menjelaskan mekanisme kebijakan moneter Islam dengan mencakup enam elemen yaitu: a) *Statutory Reserve Requirement* atau dana cadangan wajib dengan jumlah yang telah ditetapkan bank sentral. Dana cadangan sebagai pemberian jaminan berupa deposit dan penyediaan likuiditas. b) *Credit Ceillings* (pembatasan kredit). Kebijakan ini ditetapkan dengan tujuan agar bank-bank terjamin terciptanya kredit dengan kompetisi yang sehat antar bank tersebut. c) *Government Deposit* berupa kebijakan mengalihkan deposit pemerintah dari dan ke bank komersial dengan tujuan sebagai upaya mempengaruhi cadangan keuangan bank. d) *Common Pool* (satu pintu), yaitu kebijakan satu pintu bagi bank-bank komersial dalam mengatasi likuiditas bank pada bank sentral. e) Target pertumbuhan dan peredaran uang (M) serta deposito pada bank sentral (Mo). f) *Publik Shre of Demand Deposit* (uang giral), g) Alokasi kredit berdasarkan nilai, yang diarahkan pada optimisasi produksi, distribusi barang dan jasa. Diperlukan adanya jaminan kredit yang disepakati oleh pemerintah dan bank-bank komersial untuk mengurangi resiko dan biaya yang harus ditanggung bank (Chapra, 1996).

Bauran Kebijakan Fiskal dan Moneter Untuk Perekonomian

Kebijakan fiskal dan moneter harus bekerja secara terkoordinasi tanpa ada tumpang tindih dalam pelaksanaan kebijakannya. Koordinasi antara lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan baik kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter dapat dilakukan melalui skenario sebagai berikut; 1) kebijakan ekspansif pada kebijakan fiskal dan moneter; 2) kebijakan moneter kontraktif dan kebijakan fiskal ekspansif; 3) kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif; 4) kebijakan moneter dan fiskal kontraktif (Warjiwo dan Solikin, 2003).

Gambar 1. Skenario Kebijakan Moneter Indonesia



Sumber: Perry Warjiwo dan Solikin, "Kebijakan Moneter di Indonesia", Penerbit Bank Indonesia, Jakarta, dan dari berbagai sumber.

Bauran kebijakan moneter dan fiskal seperti pada gambar di atas menggambar 4 skenario seperti yang disampaikan Warjiwo dan Solikin (2003). Skenario 1 adanya kebijakan yang ekspansif baik pada kebijakan fiskal maupun moneter. Kebijakan ekspansif ini harus dikordinasikan ketika terjadi resesi ekonomi dalam waktu yang agak lama, misalnya terjadi krisis, maka dalam mengambil kebijakan pemerintah melakukan koordinasi terkait kebijakan fiskal dan moneter yang akan diambil. Pemerintah lewat kebijakan moneter mengontrol pergerakan suku bunga dengan memperhatikan sektor riil, apabila suku bunga terlalu tinggi, sektor riil akan terjadi perlambatan karena sektor investasi akan mengalami penurunan, dan sebaliknya jika suku bunga rendah, masyarakat akan melakukan penundaan menabung di perbankan dan akan cenderung melakukan berinvestasi (Warjiwo dan Solikin, 2003).

Sementara itu jika bauran kebijakan moneter dan fiskal sama-sama kontraktif, maka akan mempengaruhi laju ekspansi ekonomi. Skenario kebijakan fiskal dan moneter ditujukan salah satunya dalam meredam inflasi yang terus meningkat. Sedangkan skenario 2 dan skenario 3 merupakan dua skenario yang saling meniadakan atau memperlemah yang lain dan hasil dari kedua kebijakan tersebut bergantung kepada kekuatan pengaruh dari masing-masing kebijakan tersebut terhadap perekonomian secara keseluruhan. Skenario

2 dengan bauran kebijakan moneter kontraktif dan kebijakan fiskal ekspansif justru saling meniadakan satu sama lain dan mendorong peningkatan suku bunga sehingga dapat menghambat laju pertumbuhan investasi (tabungan) masyarakat dan sektor swasta. Dengan semakin lesunya kegiatan investasi (tabungan) masyarakat dan swasta, akibat peningkatan suku bunga maka sulit diharapkan terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Skenario 2 kecenderungannya akan memunculkan semangat berinvestasi pemerintah lewat penggunaan anggaran negara yang ekspansif dan terus meningkat.

Terdapat 4 (empat) pilihan bauran kebijakan moneter dan fiskal, yaitu: (i) Kebijakan fiskal longgar dan kebijakan moneter longgar; (ii) Kebijakan fiskal longgar dan kebijakan moneter ketat; (iii) Kebijakan fiskal ketat dan kebijakan moneter longgar; dan (iv) Kebijakan fiskal ketat dan kebijakan moneter ketat. Masing-masing otoritas memiliki dua pilihan kebijakan, yaitu: kebijakan ketat maupun kebijakan longgar. Ketika keduanya bersama-sama memilih kebijakan pengetatan, maka tingkat inflasi cenderung rendah dan jumlah lapangan kerja juga rendah (pengangguran tinggi). Sedangkan ketika kedua otoritas kebijakan memutuskan untuk bersama-sama membuat kebijakan yang longgar, maka tingkat inflasi cenderung tinggi dan angka pengangguran cenderung rendah. Sementara itu, apabila salah satu otoritas kebijakan

membuat kebijakan pengetatan, sedangkan otoritas yang lain membuat kebijakan pelonggaran atau sebaliknya maka tingkat pengangguran dan inflasi cenderung berada pada tingkat sedang (Warjiwo dan Solikin, 2003).

Selain itu dalam penelitian yang dilakukan Askari et al, (2014) menggambarkan transmisi kebijakan moneter dan fiskal dalam sistem keuangan dan ekonomi Islam. Bank sentral, dengan membeli dan menjual sekuritas pembagian resiko, secara langsung memengaruhi portofolio keuangan sektor swasta rumah tangga dan perusahaan dan secara tidak langsung dengan memengaruhi kepemilikan bank dan kondisi di pasar modal, yang pada gilirannya memengaruhi aktivitas ekonomi riil. Keputusan rumah tangga dan perusahaan berdampak pada tingkat pengembalian riil dalam perekonomian, yang sekali lagi mempengaruhi kegiatan ekonomi; sedangkan sinyal keuangan ke pasar modal melalui kebijakan bank sentral mempengaruhi ketersediaan sumber daya riil untuk investasi.

KESIMPULAN

Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang mempengaruhi kebijakan ekonomi makro. Penetapan kebijakan ekonomi secara makro akan memberikan dampak pada pencapaian peningkatan ekonomi. Agar pertumbuhan ekonomi sesuai dengan yang diharapkan, maka kebijakan moneter dan fiskal harus berjalan saling beriringan dan saling mendukung. Jika kedua kebijakan itu saling berlawanan dan tidak saling mendukung, maka pertumbuhan ekonomi akan terganggu atau malah mencapai nol. Oleh karena itu diperlukan interaksi dan interkoneksi antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal. Kedua lembaga pemerintah yang berwenang menangani masalah keduanya, baik Kementerian Keuangan sebagai penanggung jawab kebijakan fiskal maupun Bank Indonesia sebagai pemegang mandat dalam menetapkan kebijakan moneter, harus bisa menyatukan kebijakan-kebijakan demi

mendorong pertumbuhan ekonomi yang mensejahterakan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Ihda. 2019. Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 17(2), p. 43–50.
- Askari, Hossein., Iqbal, Zamir., & Mirakhor, Abbas. 2014. Fiscal and Monetary Policy in Islam. *Routledge Handbook of Contemporary Malaysia*, p. 148–161.
- Bayuni, Eva Misfah., & Srisusilawati, Popon. 2018. Kontribusi Instrumen Moneter Syariah Terhadap Pengendalian Inflasi di Indonesia. *Amwaluna*, 2(1), p. 18–38.
- Budiono. 2001. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. BPFE. Yogyakarta.
- Chapra, Muhammad Umar. 1996. Monetary Management in an Islamic Economy. *Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics*, 4(1), p. 03–22.
- Chenny, Seftarita. 2005. Kebijakan Fiskal, Kebijakan Moneter dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Simposium Riset Ekonomi II Di Surabaya, November*, p. 23–24.
- Hadi, Arijo., Sumari, Arwin Datumaya Wahyudi., & Djapri, Suparman. 2018. Bauran Kebijakan Fiskal-Moneter Dan Dampaknya Bagi Anggaran Pertahanan. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 6(3), p. 145- 170.
- Huda, Nurul., Aliyadin, Achmad., Suprayogi, Agus., Arbain, Decky Mayricko., Aji, Hastomo., Utami, Restukanti., Andriyati, Rika., & Harmoyo, Totok. 2016. *Keuangan Publik Islam; Pendekatan Teoritis dan Sejarah* (2nd ed.). Prenada Kencana. Jakarta.

- International Shari'ah Research Academy for Islam. 2015. *Sistem Keuangan Islam; Prinsip dan Operasi*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Islamy, M. Irfan. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Juhro, Solikin M., Ferry, Syarfuddin., & Sakti, Ali. 2020. *Ekonomi Moneter Islam Suatu Pengantar*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Karim, Adiwarmarman. 2001. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Mikro*. Karim Business Consulting. Jakarta.
- Karim, Adiwarmarman. 2007. *Ekonomi Makro Islam*. Rata Grafindo Persada. Jakarta.
- Karim, Adiwarmarman. 2016. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Nasution, Mustafa Edwin., Setyanto, Budi., Huda, Nurul., Mufraeni, Muhammad Arief., & Utama, Bey Sapta. 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Kencana. Jakarta.
- Pohan, Aulia. 2008. *Potret Kebijakan Moneter Indonesia*. Rajawali Press. Jakarta.
- Rosia, Rina. 2018. Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Uang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), p. 14-27.
- Rozalinda. 2015. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasi pada Aktifitas Ekonomi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Santoso, Teguh., & Basuki, Maruto Umar. 2009. Dampak Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Perekonomian Indonesia: Aplikasi Model Mundell-Fleming. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 5(2), p. 108–128.
- Sopian, Erik., Agustina, Ativa Hesti., A, Garnis., & Supandi. 2019. Fiscal and Monetary Policy in Indonesia Perspective Islamic Economy. *International Halal Conference & exhibition 2019*. 1(1), p. 8–14.
- Sukirno, Sadono. 2006. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Turmidi, Imam. 2019. Kajian Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter dalam Islam. *An-Nawa : Jurnal Studi Islam*, 1(2), p. 74-90.
- Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijaksanaan dari Reformulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Warjiwo, Perry., & Solikin. 2003. *Kebijakan Moneter di Indonesia*. Pusat Pendidikan Studi kebanksentralan. Jakarta.